

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan transparansi dalam rangka kebutuhan pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin meningkat menjadikan peran akuntan pemerintahan semakin dibutuhkan. Pemerintah telah mengatur tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dalam UU No.15 Tahun 2004. Pada Pasal 1 dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah suatu “Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”. Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin besar juga menjadi salah satu faktor dibutuhkannya akuntan pemerintahan yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan Keuangan Negara. Tuntutan akan transparansi berbanding lurus dengan besarnya dana yang dikelola. Semakin besar dana yang dikelola maka semakin besar pula tuntutan transparansi. Sehubungan dengan itu, pemerintah harus mampu menyediakan pertanggungjawaban keuangan negara yang memadai.

Perubahan yang terus terjadi menuntut Akuntan Pemerintahan agar memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami pengelolaan dan pengawasan Keuangan Negara. Pada dasarnya, agar akuntan pemerintahan sebagai pengelola dan pengawas Keuangan Negara dapat menjalankan perannya dengan baik. Akuntan Pemerintahan harus benar-benar menjaga integritas dan kredibilitas sebagai wakil dari pemerintah. Akuntan pemerintahan diharapkan mampu membantu pemerintah dengan cara menyelenggarakan praktik-praktik keuangan yang sah, jelas, tanpa kecurangan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, akuntan pemerintahan memiliki beban moral yang sangat besar karena pertanggungjawaban hasil kerja akuntan pemerintah ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai Akuntan Pemerintahan yang menjalankan fungsi pengawasan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat penting pada sistem pemerintahan. Salah satu peran APIP dalam melakukan pengawasan adalah dengan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh, diantaranya adalah dengan melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah. Jika fungsi APIP dalam melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan implementasi SPIP dapat dilaksanakan secara maksimal, maka hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kinerja pemerintah.

Selain APIP, akuntan pemerintahan yang berperan sebagai Pengelola Keuangan Negara (PKN) juga memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan. Pengelola Keuangan Negara bertanggungjawab atas terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntanbel. Pengelolaan Keuangan Negara berada ditangan Presiden. Namun, dalam pelaksanaannya Presiden selaku Kepala Negara memberi kuasa kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga (selaku Pengguna Anggaran/Barang) dan Menteri Keuangan (selaku Pengelola Fiskal), serta diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota (Pengelola Keuangan Daerah).

Pemahaman dalam pengelolaan dan pengawasan Keuangan Negara merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh Akuntan Pemerintahan. Ketika Akuntan Pemerintahan tidak memiliki pemahaman mengenai pengelolaan dan pengawasan Keuangan Negara, hal ini akan membuka peluang untuk terjadinya berbagai tindak kecurangan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu pengelolaan keuangan negara dan pengawasan yang efektif merupakan faktor yang menentukan terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan tata kelola yang baik tersebut, peningkatan profesionalisme APIP dan PKN merupakan hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan hal ini, pemerintah yang diwakili oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan dukungan Loan Number 2927-INO dan Asian Development Bank (ADB) melalui program State Accountability Revitalization (STAR) berupaya melakukan peningkatan kapasitas pegawai PKN dan APIP

dengan menyelenggarakan program beasiswa pendidikan pada jenjang Strata1(S1)/Diploma-IV (D-IV) dan Strata2 (S2).

Dalam situs resmi BPKP (<http://www.bpkp.go.id> 2018) dinyatakan bahwa penyelenggaraan program beasiswa STAR BPKP dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi (PT) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan BPKP, diantaranya adalah perguruan tinggi yang mempunyai kurikulum yang mencakup tentang Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini, ada 28 PT yang dipercaya untuk kerja sama program beasiswa STAR BPKP. Salah satu dari 28 PT yang diberi kepercayaan untuk kerjasama ini adalah Universitas Andalas. Sejak tahun 2013 sampai awal tahun 2018 terlihat dalam laporan Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Andalas bahwa telah lulus sebanyak 158 orang penerima manfaat beasiswa STAR BPKP kelas kerja sama dengan Universitas Andalas.

Salah satu tujuan dari diselenggarakannya program beasiswa STAR BPKP adalah meningkatkan kompetensi penerima beasiswa, yaitu akuntan pemerintah yang berperan sebagai APIP dan PKN. Kompetensi yang dimaksud terutama adalah kompetensi dibidang pengelolaan dan pengawasan keuangan Negara. Setelah menyelesaikan proses pendidikan melalui kelas kerja sama ini, diharapkan akuntan pemerintah sebagai penerima manfaat beasiswa STAR BPKP semakin kompeten dan memiliki pemahaman terutama dalam pengelolaan dan pengawasan Keuangan Negara.

Untuk mengukur sekaligus menunjang agar akuntan pemerintahan meningkatkan kompetensinya, pemerintah juga telah mengadakan Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (S-AAP). Sertifikat Ahli Akuntansi Pemerintahan dapat diperoleh jika lulus dalam Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (US-AAP). Ujian Sertifikasi tersebut terbagi menjadi tiga kelompok ujian. Kelompok pertama adalah US-AAP A, merupakan ujian kompetensi untuk peserta dengan persyaratan Ijazah minimal setingkat SMA/SMK sederajat. Kelompok kedua dan ketiga adalah US-AAP B dan US-AAP C, yaitu ujian kompetensi untuk peserta dengan Ijazah minimal Strata1 segala jurusan dan/atau memiliki pengalaman di bidang keuangan pemerintahan sesuai jenjangnya minimal 3 tahun. Ujian tersebut akan dijadikan alat ukur untuk menilai tingkat pemahaman peserta US-AAP secara umum dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan Negara. Selain itu, hasil

pengukuran ini juga dapat digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk memetakan kompetensi teknis SDM pengelola keuangan, dan mengambil kebijakan terkait penempatan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

Mengingat pentingnya program beasiswa STAR BPKP dalam meningkatkan kompetensi Akuntan Pemerintahan terkait dengan pengelolaan dan pengawasan Keuangan Negara/Daerah, dirasa perlu adanya evaluasi mengenai ketercapaian tujuan dari program beasiswa ini. Evaluasi mengenai ketercapaian tujuan program beasiswa STAR BPKP dapat dilakukan dengan menilai tingkat pemahaman mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan melalui program beasiswa tersebut.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai tingkat pemahaman akuntan pemerintahan berkaitan dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh akuntan pemerintahan. Ruzan (2014) menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman aparatur pengelola keuangan masih rendah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, Mugtafillah (2015) meneliti tentang analisis tingkat pemahaman pengguna potensial Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Indonesia (Sebuah Studi Eksploratif), hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat pemahaman responden dari setiap kelompok terhadap manfaat dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Indonesia cukup tinggi. Oleh karena itu penting bagi pemerintah menempatkan aparatur didalam pemerintahan sesuai dengan latar belakang yang dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah diharapkan menempatkan aparatur pengelolaan keuangan daerah yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Selain itu, Manaf (2015) mencoba melihat pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap proses revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh inspektorat dan implikasinya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada inspektorat Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan, hanya pemahaman

Standar Akuntansi Pemerintahan, dan proses reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh inspektorat yang berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan pemahaman sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh. Selain itu, Mardiana (2017) yang meneliti tentang pengaruh pemahaman akuntansi pengendalian internal dan efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh), hasil penelitian menunjukkan pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan tentang pemahaman yang harus dimiliki oleh akuntan pemerintahan guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Selain itu, adanya tuntutan kepada Akuntan Pemerintah untuk meningkatkan kompetensinya, pemerintah turut melakukan berbagai upaya dalam mendorong peningkatan kompetensi tersebut. Pada hakikatnya, tidak dapat dipungkiri bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) bahwa kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Mengingat pentingnya peran dari Akuntan Pemerintahan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dari Akuntan Pemerintah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola maupun pengawas Keuangan Negara dalam hal ini APIP dan PKN adalah dengan memberikan beasiswa. Pemberian beasiswa dianggap dapat meningkatkan kompetensi pengelola dan pengawas keuangan terutama dalam memahami lingkup pengelolaan dan pengawasan Keuangan Negara. Hal ini didukung oleh penelitian Hilwa (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan beasiswa terhadap hasil belajar siswa.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, motivasi dalam melakukan penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat pemahaman akuntan pemerintahan khususnya lulusan STAR BPKP kelas kerja sama dengan Universitas Andalas dan melihat ada atau tidaknya perbedaan pemahaman antara lulusan STAR BPKP yang berstatus APIP dan PKN dalam pengelolaan dan pengawasan Keuangan Negara. Oleh karena itu, judul pada penelitian ini adalah **Analisis Pemahaman Lulusan STAR BPKP mengenai Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Lulusan Program Studi Magister Akuntansi Pemerintah Universitas Andalas)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah;

1. Sejauhmana pemahaman lulusan STAR BPKP yang berstatus APIP mengenai Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Negara?
2. Sejauhmana pemahaman lulusan STAR BPKP yang berstatus PKN mengenai Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Negara?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan antara lulusan STAR BPKP yang berstatus APIP dan berstatus PKN mengenai pengelolaan dan pengawasan Keuangan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman lulusan STAR BPKP yang berstatus APIP mengenai Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Negara.
2. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman Lulusan yang berstatus PKN mengenai Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Negara.
3. Untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan antara lulusan STAR BPKP yang berstatus APIP dan berstatus PKN mengenai pengelolaan dan pengawasan Keuangan Negara

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti, untuk pengembangan ilmu pengetahuann yang telah didapatkan peneliti di bangku perkuliahan.
2. Bagi Subjek Penelitian, dapat dijadikan alat ukur kemampuan dalam memahami pengelolaan dan pengawasan keuangan Negara, serta dapat menjadi pemicu untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman diberbagai bidang Akuntansi Pemerintahan.
3. Bagi Akademik, Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, yang akan melakukan penelitian yang serupa.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibahas dalam lima bab, secara garis besar materi akan dibahas pada masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai bahan yang melandasi tulisan ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup mengenai objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dari bahasan yang berisi mengenai deskripsi dari objek yang diteliti, penjelasan atau pembahasan mengenai hasil perhitungan atau analisis data dengan metode analisisnya serta interpretasi hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, implikasi penelitian dan saran yang hendak disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

